

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN**

NO	DAFTAR INFORMASI	DASAR HUKUM	BADAN PUBLIK	BATAS WAKTU PENGEKUALIAN	KONSEKUENSI	
					AKIBAT BILA INFORMASI DIBUKA	MANFAAT BILA INFORMASI DITUTUP
1	Kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening bank seseorang	Pasal 17 huruf angka 3 UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP				
	a. Laporan Keuangan yang belum diaudit	Kemendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah	DPUPR	Sampai audit selesai	Informasi belum terjamin kebenarannya	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak bisa diekspos
	b. Kode PIN Rekening Bank Pegawai	UU No.11 Tahun 28 tentang ITE pasal 1 angka 6	DPUPR	Selama persetujuan yang bersangkutan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Rekening Bank
2	Hasil Evaluasi sehubungan dengan kapasitas, intelektual dan rekomendasi kemampuan seseorang					
	a. Daftar nilai SKP Pegawai	UU No.14 tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	DPUPR	Selama periode penilaian yang ditentukan	Mengungkap data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi privasi data pribadi pegawai
	b. Dokumen pengelolaan kepegawaian (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, pensiun, pemindahan pegawai)	UU No.14 tahun 2008	DPUPR	Sampai diterbitkannya SK	Dapat menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS	Menjaga kondisi yang kondusif di lingkungan pemerintahan.
3	Dokumen penawaran Kontrak Pengadaan barang dan jasa	Perpres No.54 Tahun 2010 ttg pengadaan barang dan jasa pasal 66	DPUPR	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat	Bisa menjaga keakuratan dan obyektifitas penilaian.
		Perpres No.70 Tahun 2012 ttg pengadaan barang dan jasa	DPUPR			
4	Dokumen pendukung pengadaan barang/jasa	UU No.14 tahun 2008	DPUPR	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang / jasa	Mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam pelelangan	Melindungi pelelangan agar tetap dapat dipertanggungjawabkan
5	Rincian Harga Satuan dalam Perhitungan/Harga Perkiraan sendiri (HPS)	Perpres No.70 Tahun 2012 ttg pengadaan barang dan jasa				
6	Ijin Perceraian PNS	UU No.8/1974 ttg perkawinan	DPUPR	Proses perijinan sampai dengan penjatuhan keputusan	Pihak luar campur tangan	Kelancaran proses perceraian
7	SPJ, SPM, SPP, SP2D	UU No.8/1974 ttg Keuangan Negara UU No.1 Th. 2004 ttg Perbendaharaan Negara.	DPUPR	Masa pelaksanaan pekerjaan	Mengungkapkan data ketidakwajaran	Menjaga kerahasiaan pembelanjaan

8	Penataan Kinerja Pegawai	Peraturan No.23 tahun 2007	DPUPR	Selama periode	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai
9	Hukuman disiplin pegawai	PP No.56 ttg hukuman disiplin pegawai	DPUPR	Selama bekerja	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Menjaga kerahasiaan pegawai
10	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	UU No.14 tahun 2008	DPUPR	Sampai ada keputusan	dapat menghambat proses penegakan hukum dan mengungkap rahasia pribadi seorang PNS	
11	Penilaian prestasi kerja PNS (mulai tahun 2014)	PPTTh.2011 ttg penilaian prsetasi kerja PNS	DPUPR	Bersifat terbuka dalam proses manajemen, tetapi tidak untuk dipublikasikan (terbatas untuk manajemen kepegawaian)	Mengungkapkan data pribadi PNS yg bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

Madiun, Pebruari 2022
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA MADIUN

Ir. SUWARNO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19651016 198603 1 010